

Judul : Alarm dari "Parlemen Jalanan"
Tanggal : Rabu, 31 Desember 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

Alarm dari "Parlemen Jalanan"

Sepanjang 2025, DPR berulang menjadi sorotan publik. Berulang pula unjuk rasa digelar di hadapan para wakil rakyat yang ber Kantor di Senayan, Jakarta. Keresahan publik dipantik pembahasan undang-undang yang terburu-buru dan tak selaras dengan aspirasi publik. Tak jarang pula, keresahan dipicu pernyataan dan sikap sejumlah wakil rakyat yang tak

peka dengan kondisi masyarakat. Di luar itu, beberapa kali DPR juga menjadi sasaran kemarahan publik karena kebijakan pemerintah. "Parlemen jalanan" timbul sebagai saluran pelampiasan kekecewaan publik. "Parlemen jalanan" sekaligus menandai jarak yang kian menganga antara wakil rakyat dan mereka yang diwakilinya. Situasi itu semestinya

menjadi cermin bagi DPR untuk berbenah. Perbaikan tak cukup berhenti pada retorika keterbukaan. Perbaikan harus memperkuat fungsi representasi, mendengar, dan berdialog sebelum memutuskan. Perbaikan harus pula diwujudkan lewat proses legislasi yang transparan, partisipatif, dan sensitif terhadap denyut persoalan publik.

1 Kontroversi Revisi UU Minerba (Februari 2025)
DPR dan pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Revisi memantik polemik karena salah satu klausul memberikan pengelolaan tambang bagi organisasi keagamaan hingga hak kerja sama dengan perguruan tinggi. Tak hanya itu, proses pembahasan yang kilat atau tak sampai sebulan, juga memantik kritik dari sejumlah kalangan.

2 Demonstrasi "Indonesia Gelap" (17-20 Februari 2025)
Demonstrasi besar di Gedung DPR pada 2025 dimulai dengan demo "Indonesia Gelap" pada 17-20 Februari. Demonstran menolak sejumlah kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat, terutama terkait efisiensi anggaran. Selain itu, mereka juga menolak revisi UU Pertambangan Mineral dan Batubara terkait konsesi tambang untuk perguruan tinggi, revisi UU TNI, serta mendorong pengesahan UU Perampasan Aset.

3 Kontroversi Revisi UU TNI (Maret 2025)
Gelombang penolakan terhadap revisi UU TNI mengutip sejak awal Maret 2025, terutama dari kalangan masyarakat sipil yang menilai revisi ini berpotensi mengembalikan militerisme ke ranah sipil atau diuntungkan TNI, serta menggerus prinsip supremasi sipil. Selain unjuk rasa terjadi di Gedung DPR dan sejumlah daerah, salah satu yang jadi sorotan ketika sejumlah perwakilan kelompok masyarakat sipil "menggeruduk" pembahasan revisi UU TNI yang digelar tertutup di salah satu hotel mewah di Jakarta. Meski demikian, revisi UU TNI oleh DPR dan pemerintah tetap berlanjut hingga disahkan menjadi UU pada 20 Maret 2025.

4 Polemik Gaji dan Tunjangan Anggota DPR (pertengahan Agustus 2025)
Di tengah problem ekonomi yang membelit masyarakat, mencuat nominal gaji dan tunjangan fantastis yang diterima setiap anggota DPR. Sorotan terutama pada tunjangan perumahan anggota DPR yang mencapai Rp 50 juta per bulan untuk setiap wakil rakyat. Amarah publik kian memuncak ketika pernyataan dan sikap sejumlah anggota DPR yang terkesan meremehkan kritik dan keadaan sulit yang dihadapi masyarakat. Unjuk rasa di DPR yang berlangsung sejak 25 Agustus 2025 memanas setelah seorang pengemudi ojek daring dilincir oleh kendaraan taktis Brimob.

5 Kementerian Baru dari Pengesahan RUU Haji (pertengahan Agustus 2025)
RUU Penyelenggaraan Haji dan Umrah disepakati untuk disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (26/8/2025). Pembahasan RUU ini di DPR pun berlangsung cepat atau hanya sekitar dua pekan. Melalui undang-undang ini, pemerintah dan DPR menyepakati pembentukan kementerian baru, yakni Kementerian Haji dan Umrah.

6 Proses Kilat Pembahasan RUU Penyesuaian Pidana (Desember 2025)
Setelah pengesahan RKUHP, DPR dan pemerintah membahas dengan cepat RUU Penyesuaian Pidana. Pengesahan RUU ini dianggap penting untuk menghindari ketidakpastian hukum saat KUHP berlaku per 2 Januari 2026. Proses pembahasan RUU tersebut juga berlangsung cepat, dimulai pada 24 November kemudian disetujui disahkan menjadi UU pada Rapat Paripurna DPR, 8 Desember 2025.

7 Goyang-goyang RKUHP (18 November 2025)
Sejak mulai dibahas pada awal Juli 2025, pembahasan RKUHP oleh pemerintah dan DPR terus menuai sorotan publik. Meski pemerintah dan DPR mengklaim pembahasannya telah menyerap aspirasi publik, tidak demikian yang dilihat oleh sejumlah kelompok masyarakat sipil. Selain sejumlah pasal dinilai bermasalah, pembahasan RKUHP juga dinilai terburu-buru. Akibatnya, hingga pengesahan menjadi UU di Rapat Paripurna DPR, pada 18 November 2025, kritik dan penolakan publik terus menyertai. Mereka bahkan berencana mengupat KUHP baru itu ke Mahkamah Konstitusi.

8 Sidang Etik Anggota DPR oleh MKD (5 November 2025)
MKD memutuskan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach (Nasdem) serta Eko Patrio (PAN) terbukti melanggar kode etik anggota DPR. Sebagai sanksi, mereka dinonaktifkan sebagai anggota DPR tiga sampai enam bulan. Dua anggota DPR lain, yakni Adies Kadir (Golkar) dan Uya Kuya (PAN), dinyatakan tak bersalah sehingga lolos dari sanksi etik MKD. Kelimanya disidang oleh MKD karena tindakan atau ucapan mereka menyakiti publik sehingga memantik unjuk rasa Agustus 2025 yang berujung kerusuhan.

9 Janji Evaluasi dan Perbaikan DPR (September 2025)
Setelah unjuk rasa Agustus, DPR menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota Dewan terhitung sejak 31 Agustus 2025. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mengutus dewan pelanggaran kode etik oleh sejumlah anggota DPR yang pernyataannya memicu unjuk rasa. Mereka adalah Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Partai Nasdem, Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Surya Utama (Uya Kuya) dari PAN, serta Adies Kadir dari Partai Golkar yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR. Selain itu, Ketua DPR Puan Maharani berjanji DPR akan berbenah dan lebih baik ke depan.

10 Muncul Gerakan "17+8 Tuntutan Rakyat" (awal September 2025)
Di tengah unjuk rasa Agustus-September 2025, mahasiswa dan sejumlah pemengaruh mengulirkan gerakan "17+8 Tuntutan Rakyat". Sebanyak 17 tuntutan didasakkan untuk diselesaikan dalam satu pekan dan delapan tuntutan lain dalam jangka satu tahun sejak 1 September 2025. Di antara tuntutan utama ialah pembekuan tunjangan perumahan anggota DPR dan transparansi anggaran DPR. Untuk tuntutan jangka panjang, DPR dan pemerintah didorong agar segera mengesahkan UU Perampasan Aset. Selain itu, mereka juga mendesak reformasi besar-besaran terhadap DPR dan kepolitisan.